



Dewan Keberatan Hibah Dipangkas

■ Kekurangan Dana, Disarankan Potong di SKPD

DENPASAR, TRIBUN BALI – Pimpinan DPRD Bali dan eksekutif Pemprov Bali menggelar rapat tertutup selama 1 jam mulai di ruang rapat pimpinan DPRD. Rapat membahas soal kekurangan anggaran dari pusat. Ada usulan agar ada pemangkasan anggaran seperti hibah, namun dewan kompak menolak pemangkasan tersebut.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Kadek Diana menyatakan, DPRD Bali menyadari adanya krisis finansial, dimana penambahan pendapatan asli daerah (PAD) juga melambat. Namun ia menolak jika adanya pemangkasan dana hibah.

"Selalu ada rencana hibah dipangkas, tadi (kemarin) juga ada rencana hibah dipangkas dan enggak dianggarkan di APBD Perubahan 2017," keluhnya, Senin (13/3). Menurutnya, hibah dirasa sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu DPRD Bali meminta hibah jangan dipangkas.

Menurutnya, dana lain di SKPD yang tidak prioritas bisa dipangkas. "Kami berikan mereka (eksekutif) yang memotong. Nanti pasti dikumpulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dipangkas program yang tidak menjadi prioritas," jelasnya.

Dalam rapat tertutup ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali,

Nyoman Sugawa Korry dengan beberapa alat kelengkapan dewan mulai ketua fraksi dan ketua komisi di DPRD Bali. Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry mengatakan, rapat digelar tertutup karena memang baru tahap awal rapat dan rapat secara internal.

Rapat ini membahas terkait

targét Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang tidak tercapai. Hal inipun karena Dana Alokasi Umum (DAU) terkait dengan pemindahan SMA/SMK ke Pemprov Bali tidak ditransfer sesuai dengan jumlah yang sesuai.

"Kami sepakat akan tanya-kan ke Menteri Keuangan dan

ke Badan Anggaran DPR RI," ujar politisi partai Golkar ini. Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Kadek Diana mengatakan, peralihan kewenangan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi tidak diimbangi dengan DAU yang sesuai dari pemerintah pusat.

Menurutnya, dana alokasi umum dari pusat ke pemprov hanya bertambah Rp 254 miliar dari seharusnya Rp 542,7 miliar. Ini membuat selisih Rp 288,7 miliar yang harus ditutupi dari PAD APBD Bali.

"Kami kekurangan anggaran itu, DAU dikasih kurang dari pusat. Karena dipakai sumber PAD, maka kami harus lakukan rasionalisasi. Caranya, satu ada berupa pengurangan volume kegiatan, sehingga mengurangi pembiayaan. Kedua pemangkasan anggaran," jelasnya. (agw)



TRIBUN BALI/AA GDE PUTU WAHYURA

DISKUSI - Kepala Bappeda Bali, Putu Astawa saat berbicara dengan Ketua Fraksi Panca Bayu, Kadek Nuartana selepas rapat tertutup dengan DPRD Bali, Senin (13/3).

Harus Ada Rasionalisasi

KEPALA Bappeda dan Litbang, Bali, Putu Astawa menjelaskan, APBD tahun 2016 penyerapan anggaran cukup bagus, yakni 94 persen. Adapun Silpa Pemprov Bali Rp 169 miliar dimana itu adalah Silpa bebas yang bisa digunakan, sementara defisit APBD 2017 sebesar Rp 505 miliar. Dengan begitu, ada potensi defisit Rp 335 miliar. Kalau hanya mengandalkan Silpa maka tidak akan cukup menutupi APBD 2017.

"Caranya kami akan memperjuangkan DAU ke pusat, kedua ya caranya rasionalisasi. Kami akan sisir lagi program yang bukan prioritas," jelasnya. Disinggung mengenai program apa saja yang akan dipotong, Astawa masih belum punya gambaran untuk saat ini.

Ia mengatakan, langkah rasionalisasi adalah pilihan terakhir. Sebelum itu pihaknya akan kembali mengajukan pertimbangan ke Kemenkeu RI dan

juga mengusulkan pemasukan dari program yang belum pernah dibantu pusat.

"Harapan kami, dibayarkan DAU itu. Selain itu, kami akan mengajukan anggaran untuk pemeliharaan budaya, subak, karena dari pariwisata kami kan banyak menghasilkan devisa. Kami akan kaji agar ada pemeliharaan budaya ke desa Pakraman sebesar Rp 297 miliar, dan ke subak sebesar Rp 134 miliar," jelasnya. (agw)

Edisi : Selasa, 14 Maret 2017

Hal : 15